

## ANALISA PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB) KOTA MALANG

**Arthi Mudji, Willstar Taripar**

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kota Malang

**Abstrak:** Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian negara/wilayah dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Tujuan dari penelitian menggambarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang Tahun 2017 adalah untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota Malang lebih detail pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2017 melalui angka PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Hasil penelitian pertumbuhan ekonomi Kota Malang di tahun 2016 hampir tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini diperkirakan akan terus membaik dikarenakan kondisi makroekonomi regional dan nasional juga semakin kondusif.

**Kata kunci:** Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

*Abstract: The main objective of economic development is to strive for an increase in people's incomes followed by an even distribution. The performance of the country / region economy can be reflected in the level of economic growth and economic stability. The purpose of the study describes Gross Regional Domestic Product (PDRB) Malang City Year 2017 is to know the condition of the economy of Malang city more detail achievement of economic development in 2017 through PDRB figures and economic growth in 2017. Research results of economic growth of Malang City in 2016 almost unchanged from the previous year, this condition is expected to continue to improve as regional and national macroeconomic conditions are also increasingly conducive.*

**Keywords:** Economic Development, Economic Growth, Gross Regional Domestic Product

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan dan kebijakan yang bertujuan untuk (i) peningkatan taraf hidup masyarakat, (ii) perluasan lapangan kerja, (iii) pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, (iv) peningkatan hubungan ekonomi regional, serta (v) pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kinerja perekonomian negara/wilayah dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana, PDB/PDRB memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi negara/wilayah.

Angka-angka Pendapatan Regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator berupa data agregat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Disamping itu PDRB juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi kegiatan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. Secara umum, nilai dari PDRB dapat dihitung dengan menggunakan nilai harga yang berlaku dan nilai harga konstan (menggunakan tahun dasar) yang secara berurutan biasa disebut sebagai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan beragam data statistik untuk dasar penentuan strategi dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa-masa yang lalu perlu dimonitor dan dilihat hasil-hasilnya. Berbagai

data statistik yang merupakan ukuran kuantitas mutlak diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. Pengukuran PDRB secara umum menggunakan 2 (dua) acuan harga, yakni (1) acuan harga yang berlaku saat ini (*current price*) dan (2) acuan harga konstan (*base price*). Untuk PDRB yang menggunakan harga saat ini biasa disebut dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mengukur segala macam aktivitas ekonomi dengan harga yang berlaku sekarang; sementara PDRB yang memakai harga tahun dasar disebut PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang dilakukan dengan menghitung segala aktivitas dengan patokan harga yang telah dipilih sebagai tahun dasarnya (*base year*), tujuannya adalah untuk memperoleh besaran PDRB dengan menghiraukan perubahan naik-turunnya harga (inflasi).

Kegiatan Penyusunan Analisa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang Tahun 2017 ini merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian regional, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator tersebut diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu, dapat menggambarkan struktur ekonominya dan dapat menggambarkan analisisnya terhadap kinerja sektor perekonomian. Tujuan dari penelitian menggambarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang Tahun 2017 adalah untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota Malang lebih detail pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2017 melalui angka PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017.

## **1. Pembangunan Ekonomi**

### **a. Konsepsi Pembangunan Ekonomi**

Portes dan Catells dalam Soedjatmoko & Sadoko (1995) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Siagian (1994) mendefinisikan bahwa pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Konsepsi mengenai pembangunan juga dapat diartikan dengan proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

### **b. Pembangunan Kewilayahan**

Daerah merupakan sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga mempunyai kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Pembahasan pembangunan ekonomi secara nasional dititikberatkan pada analisis ekonomi makro, sementara pembahasan pembangunan ekonomi di tingkat wilayah membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam suatu ruang ekonomi (*economic space*) tertentu (Sukirno, 1976).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan atau kesempatan kerja baru serta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Kuncoro, 2004). Terkait dengan urusan pembiayaan, makna terpenting adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber daya potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kemajuan daerah lebih cepat tercapai.

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Boediono (1999), faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah.

## **2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **a. Definisi PDRB**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan.

### **b. Pendekatan Penghitungan**

Berikut ini merupakan pendekatan perhitungan PDRB: (1) Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun) (2) Pendekatan Pengeluaran, jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) (3) Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

### **c. Metode Penghitungan**

Berikut ini merupakan metode perhitungan PDRB: (1) Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku, penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu: a) Metode Langsung; pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Metode Tidak Langsung, b) Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya. (2) Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) merupakan pertumbuhan ekonomi riil yang tidak dipengaruhi

oleh nilai perubahan harga akibat adanya inflasi. Pada saat ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010, tahun ini dipilih dengan beberapa pertimbangan yang mendasarinya.

### **3. Kualitas Pertumbuhan**

#### **a. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (2001), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (stagnasi). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu: (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang-barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut Sukirno (1976) faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Todaro & Smith (2006) mengatakan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

#### **b. Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah**

Arsyad (2005) menyebutkan bahwa penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Adam Smith dan David Ricardo dalam Case, Fair, & Oster (2012) sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga faktor produksi: tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat.

#### **c. Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan**

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antargolongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antardaerah. Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah

indikator yang digunakan untuk menganalisis “*development gap*” atau “disparitas” antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu: (1) Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota (2) Konsumsi rumah tangga per kapita (3) *Human Development Index* (4) Kontribusi sektoral terhadap PDRB (5) Struktur Fiskal.

#### **4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

##### **a. Kependudukan**

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap.

*Tahap Pertama*, adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada *tahap kedua*, karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga*, penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah (Susanti, 1995).

##### **b. Ketenagakerjaan**

Tambunan (2001) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), tenaga kerja adalah usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

## **METODE**

### **1. Ruang Lingkup dan Lokasi Kajian**

Kajian ini bertujuan untuk melakukan Penyusunan Analisa Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang tahun 2017 dengan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota Malang lebih detail mengenai pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2017 melalui angka PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017.

## **2. Metode Analisa**

### **a. Analisa Deskriptif**

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis dari hasil penghitungan indikator atau ukuran statistik yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang. Metode ini memberikan rangkuman sederhana mengenai data yang sudah dikumpulkan dalam berbagai macam tabel, grafik, dan gambar yang terkait dengan data PDRB Kota Malang.

Selain melakukan analisa deskriptif terhadap data yang berasal dari BPS Kota Malang, analisa juga dilakukan dengan menambahkan dan memperkaya hasil perhitungan PDRB dengan data terkait yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga didapatkan hasil yang lebih jelas penyebab terjadinya perubahan (naik-turunnya) satu sektor dan sektor lainnya dalam PDRB. Data yang berasal dari OPD dan pihak terkait berguna untuk pendalaman informasi yang tercatat dalam PDRB sehingga bisa diketahui keterkaitan variabel ekonomi yang mempengaruhi PDRB Kota Malang.

### **b. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan Analisa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang berasal dari data sekunder. Kebutuhan utama data ini berasal dari publikasi BPS Kota Malang tentang PDRB Kota Malang, Kota Malang Dalam Angka dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan analisa. Sementara itu, untuk mendukung dan mendapatkan gambaran secara lebih mendalam data juga dapat berasal dari beberapa dokumen perencanaan Kota Malang seperti: (1) RPJP Kota Malang; (2) RPJMD Kota Malang; dan (3) Renstra SKPD yang terkait dengan Kegiatan Perekonomian di Pemerintah Kota Malang. Selain itu, data dari masing-masing OPD Kota Malang juga mempunyai peran penting dalam memperkaya analisa PDRB Kota Malang

### **c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini diselenggarakan secara kontraktual dimana secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Tahapan Persiapan

Kegiatan persiapan bertujuan membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan, termasuk melakukan koordinasi dalam menyusun jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan.

#### 2) Tahapan Pelaksanaan/Survei

Kegiatan survei dan studi literatur bertujuan mengumpulkan data lapangan, data instansional, dan data pustaka.

#### 3) Tahapan Analisa/Penyusunan

Data hasil survey disajikan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Struktur Ekonomi Kota Malang**

Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan mengenai kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan Tabel1 mengenai data kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang tahun 2013-2016, diketahui bahwa lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi Kota

Malang. Dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama kurun waktu 2013-2016 masih mendominasi didalam pembentukan PDRB, dengan kontribusi rata-rata presentase pertahun sebesar 29%.

Selanjutnya kontribusi kedua terbesar ditunjukkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan mencapai rata-rata pertahun sebesar 28 persen terhadap PDRB Kota Malang. Kemudian ketiga diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang mencapai rata-rata 13 persen pertahunnya selama periode 2013 – 2016 terhadap Kota Malang. Sementara lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 8 persen. Secara umum, jika melihat data kontribusi setiap lapangan usaha dan dalam kurun waktu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih belum tergeser oleh lapangan usaha lainnya. Sedangkan sektor lapangan usaha yang memiliki peran kontribusi terkecil terhadap struktur ekonomi Kota Malang ditahun 2016 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 0,09 persen selanjutnya diikuti oleh pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03 persen serta sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,19 persen.

*Tabel 1. Kontribusi Lapangan Usaha di Kota Malang Tahun 2013-2016 (%)*

Uraian		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,28	0,28	0,27	0,26
B	Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,11	0,10	3,77
C	Industri Pengolahan	28,24	27,15	26,51	28,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	0,20	0,19	0,19
F	Konstruksi	12,13	12,56	12,53	12,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,88	28,48	28,91	29,55
H	Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,40	2,41	2,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,37	4,88	4,80	4,90
J	Informasi dan Komunikasi	4,00	3,94	3,97	3,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	2,92	2,97	3,05
L	Real Estate	1,38	1,36	1,41	1,41
M,N	Jasa Perusahaan	0,74	0,75	0,77	0,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,69	1,58	1,52	1,48
P	Jasa Pendidikan	7,69	8,01	8,15	8,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	2,44	2,49	2,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,93	2,92	2,97	2,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, 2017

Kegiatan pada lapangan usaha Perdagangan Besan dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sejak tahun 2014 ada kecenderungan semakin meningkat kontribusinya. Tingkat resiko dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan merupakan pilihan masyarakat dalam menentukan pilihan mata pencahariannya. Hal ini berbeda dengan kegiatan lapangan usaha industri pengolahan yang memiliki kontribusi dengan kecenderungan menurun. Salah satu penyebab adalah resiko pengadaan bahan baku.

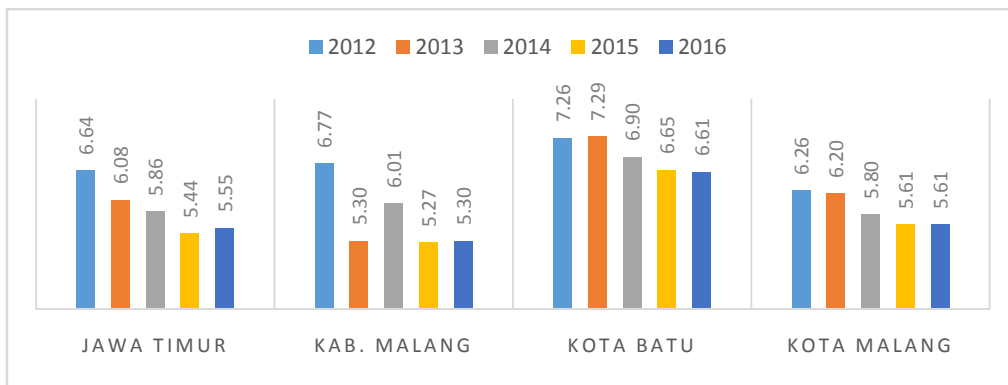
Kebutuhan yang besar akan aksesibilitas transportasi maupun bangunan di Kota Malang dapat menjadi penyebab kebutuhan akan sektor lapangan usaha Konstruksi akan semakin meningkat pula. Walaupun secara pertumbuhan didalam sektor ini kecenderungan semakin menurun akan tetapi sektor ini masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan. Dapat dilihat dalam tabel

di atas bahwa sektor lapangan usaha Konstruksi menyumbang kontribusi sebesar 12,92 persen didalam struktur PDRB Kota Malang pada tahun 2016.

**3. Pertumbuhan Ekonomi**

Proses perubahan perekonomian suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami penurunan tiap tahunnya selama periode 2013 – 2016. Penurunan pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yakni 0,40 persen jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi ditahun 2013 dan pada tahun 2015 sebesar 0,19 persen jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi ditahun 2014. Sedangkan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Malang sebesar 5,61 persen hal ini tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2015.

*Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Dan Malang Raya Tahun 2013-2016 (%)*

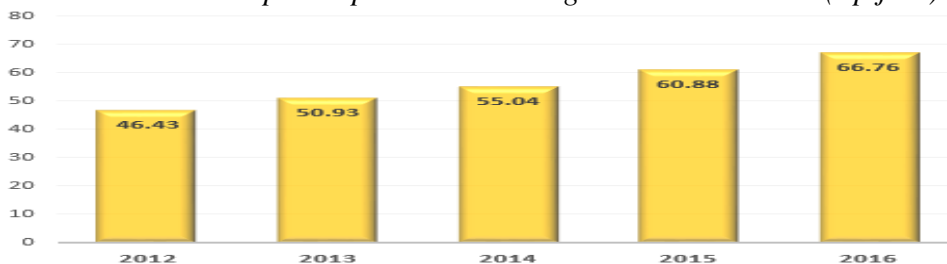


Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kota Batu, Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kota Malang memiliki kecenderungan masih berada diatas rata-rata Jawa Timur dan Kabupaten Malang

**4. PDRB Per Kapita Kota Malang**

Pengertian dari PDRB per kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan pertambahan jumlah penduduk, diperoleh data PDRB per Kapita Kota Malang yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi meningkat setiap tahunnya.

*Gambar 2. PDRB per Kapita Kota Malang Tahun 2012-2016 (Rp juta)*



Sumber: BPS Kota Malang, 2017

PDRB Per Kapita Kota Malang merupakan yang tertinggi jika dibandingkan oleh wilayah sekitarnya yakni Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dimana PDRB per kapita



Kota Batu sejak empat tahun terakhir atau periode 2013 – 2016 memiliki jumlah PDRB perkapita masing-masing tiap tahunnya sebesar 46,27 juta; 51,66 juta; 57,41 juta; dan 63,77 juta Rupiah.

### 5. Analisa PDRB Pendekatan Pengeluaran

Pendapatan Domestik Regional Bruto dengan Pendekatan Pengeluaran merupakan salah satu dari perhitungan PDRB. Pada tabel berikut ini, dijelaskan mengenai perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang atas dasar harga konstan 2010 menurut pendekatan pengeluaran. Dengan mengetahui kontribusi masing-masing komponen penyumbang PDRB dengan metode pengeluaran akan dapat diketahui komponen terbesar yang berkontribusi terhadap keseluruhan angka PDRB baik di Jawa Timur dan Kota Malang.

*Tabel 2. PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)*

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	93,946.70	39,533.90	781,086.60	808,349.30	845,095.40
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,808.50	11,980.90	13,575.00	13,419.20	4,206.30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	64,791.30	68,204.70	70,049.40	71,682.80	66,655.70
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,922.00	330,280.80	344,715.60	364,981.00	386,946.00
Perubahan Inventori	71.20	1,232.00	35,268.10	30,384.50	16,464.40
Ekspor Luar Negeri	94,727.30	98,883.60	94,635.80	190,037.10	214,416.10
Impor Luar Negeri	22,000.10	36,352.00	69,540.30	40,955.50	41,000.50
Net Ekspor Antar Daerah	7,197.90	9,025.80	92,894.30	93,496.60	02,452.70
<b>PDRB</b>	<b>1,124,464.60</b>	<b>1,192,789.80</b>	<b>1,262,684.50</b>	<b>1,331,395.00</b>	<b>1,405,236.10</b>

Sumber: BPS Kota Malang, 2017

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar nilai PDRB Provinsi Jawa Timur di pengaruhi oleh komponen pengeluaran konsumsi. Data menunjukkan selama 5 tahun terakhir, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga selalu memberikan porsi lebih dari 50% dari total PDRB yang terbentuk. Hal ini wajar, jika dilihat berdasarkan pola pembentuk PDRB dari tahun ke tahun, pengeluaran masyarakat Indonesia umumnya banyak dikendalikan oleh sektor konsumsi. Sedangkan porsi terendah disumbang oleh komponen pengeluaran LNPRT yang berkisar antara 1-2% di setiap tahunnya.

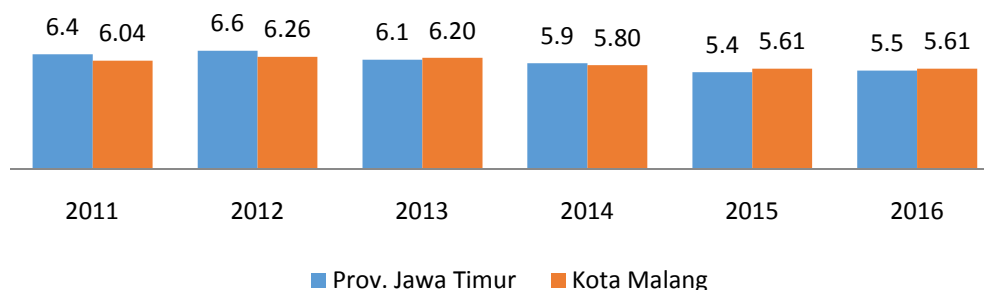
*Tabel 2. PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)*

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>25,149.97</b>	<b>26,776.54</b>	<b>28,340.03</b>	<b>29,357.92</b>	<b>30,838.46</b>
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>143.50</b>	<b>155.71</b>	<b>178.98</b>	<b>171.58</b>	<b>178.13</b>
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>1,280.47</b>	<b>1,360.50</b>	<b>1,399.88</b>	<b>1,431.00</b>	<b>1,335.31</b>
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>11,313.50</b>	<b>12,007.69</b>	<b>12,505.08</b>	<b>13,456.21</b>	<b>14,330.20</b>
<b>Perubahan Inventori</b>	<b>0.39</b>	<b>9.32</b>	<b>446.24</b>	<b>421.66</b>	<b>409.61</b>
<b>Ekspor Luar Negeri</b>	<b>12,912.75</b>	<b>4,474.37</b>	<b>16,517.58</b>	<b>17,347.57</b>	<b>18,655.01</b>
<b>Impor Luar Negeri</b>	<b>5,444.84</b>	<b>17,236.40</b>	<b>19,663.09</b>	<b>20,233.80</b>	<b>21,442.82</b>
<b>PDRB</b>	<b>35,355.74</b>	<b>37,547.74</b>	<b>39,724.70</b>	<b>41,952.13</b>	<b>44,303.90</b>

Sumber: BPS Kota Malang, 2017

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan di data PDRB Kota Malang, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi tulang punggung utama dalam membentuk PDRB Kota Malang. Komponen ini memiliki kontribusi sangat tinggi mencapai 70 persen di setiap tahunnya. Sedangkan komponen yang paling sedikit berkontribusi terhadap PDRB Kota Malang disumbang oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT. Kemudian, secara agregat perbandingan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang menurut pendekatan pengeluaran dapat dilihat pada grafik berikut ini. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang ternyata memiliki kesamaan pola.

Selama 5 (lima) tahun, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi naik turun. Hal tersebut juga diikuti oleh Kota Malang dengan pola fluktuasi yang hampir sama. Pertumbuhan tertinggi, baik untuk Provinsi Jawa Timur maupun Kota Malang di capai pada tahun yang sama, yaitu tahun 2012. Pada tahun tersebut, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur mencapai sebesar 6.6 persen dan Kota Malang sebesar 6.26 persen.



Gambar 2. Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran Jawa Timur dan Kota Malang Tahun 2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kota Malang, 2017

Gambaran lain yang dapat disimpulkan yang lain adalah, adanya keberhasilan akselerasi pertumbuhan PDRB Kota Malang yang mampu mengungguli pertumbuhan yang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur yaitu pada tahun 2013, 2015 dan 2016. Kondisi ini menggambarkan perekonomian Kota Malang sudah mulai bergeliat lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Jika disimak lebih lanjut, share masing-masing komponen PDRB Kota Malang terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini. Secara umum, tabel dibawah ini menggambarkan share PDRB Kota Malang terhadap Provinsi Jawa Timur yang cenderung konstan, berada di kisaran 3.15 persen di setiap tahunnya.

Tabel 3. Share PDRB Kota Malang terhadap Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran

	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.62%	3.62%	3.63%	3.63%	3.65%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.33%	1.30%	1.32%	1.28%	1.25%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.98%	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.59%	3.64%	3.63%	3.69%	3.70%
Perubahan Inventori	0.55%	0.76%	1.27%	1.39%	2.49%
Ekspor Barang dan Jasa	6.63%	7.28%	8.49%	9.13%	8.70%
Impor Barang dan Jasa	6.96%	7.29%	7.30%	8.40%	8.90%
<b>PDRB</b>	<b>3.14%</b>	<b>3.15%</b>	<b>3.15%</b>	<b>3.15%</b>	<b>3.15%</b>

Sumber: Hasil Perhitungan, 2017

Sedangkan untuk masing-masing komponen, komponen yang memberikan rata-rata share yang tertinggi adalah komponen ekspor barang dan jasa yaitu sebesar 8.05 persen selama 5 (lima) tahun terakhir, kemudian disusul impor barang dan jasa yaitu sebesar 7.77 persen untuk rentang waktu yang sama. Hasil ini menjelaskan bahwa, sebenarnya PDRB Kota Malang menurut pendekatan pengeluaran banyak didominasi oleh aktivitas perdagangan barang dan jasa. Hal ini wajar, karena perekonomian Kota Malang notabene memang dikendalikan oleh sektor perdagangan. Sedangkan komponen lain, misalnya pembentukan modal tetap domestik bruto dan pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki rata-rata share sebesar 3.65 persen dan 3.63 persen. Sedangkan komponen yang memiliki share paling rendah adalah pengeluaran konsumsi LNPRRT.

## KESIMPULAN

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang di tahun 2016 sebesar 5.61% hampir tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada 5.60%, kondisi ini diperkirakan akan terus membaik dikarenakan kondisi makroekonomi regional dan nasional juga semakin kondusif. Komponen utama pembentuk PDRB sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga yang secara rata-rata sebesar 70% per tahun dan komponen pembentuk modal tetap bruto (PMTB) dengan rata-rata sebesar 32% per tahun.
- b. Dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indikator Indeks Gini, sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 indeks Gini Kota Malang berada kisaran angka 0,38 yang dapat dikategorikan sebagai daerah dengan ketimpangan yang relatif sama.
- c. Jumlah penduduk (keluarga) miskin Kota Malang pada tahun 2015 berdasarkan kriteria BKKBN adalah sebanyak 204,179 keluarga sementara berdasarkan kriteria BPS terdapat sebanyak 37.030 jiwa yang masuk kategori di bawah garis kemiskinan; tingkat kemiskinan Kota Malang secara umum mengalami penurunan tiap tahunnya, hingga pada tahun 2016 berada pada angka 4.33%; dan

## 6. SARAN

Terkait dengan beberapa temuan dan kesimpulan dalam analisa PDRB Kota Malang ini, maka berikut disampaikan saran dan rekomendasi:

- a. Perlu adanya upaya untuk melakukan *shifting* sektor dominan dalam PDRB Kota Malang, sehingga tidak hanya didominasi oleh 3 sektor utama saja yaitu: 1). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2). Sektor Industri Pengolahan; dan 3). Sektor Konstruksi.
- b. Menjaga agar stabilitas makro ekonomi Kota Malang selalu kondusif dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan, hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran yang berasal dari konsumsi rumah tangga sangat besar kontribusinya. Adanya upaya untuk mempermudah proses perijinan dan investasi harus terus dilakukan guna meningkatkan kontribusi dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai salah satu komponen dominan lainnya dari PDRB sisi pengeluaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2005). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi Kedu). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Badan Pusat Statistik RI, 2016, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Menurut Pengeluaran 2012-2016*, BPS Kota Malang, Malang.

- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2017. Kota Malang Dalam Angka 2017, BPS Kota Malang, Malang.
- Bank Indonesia, 2017. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2016. Bank Indonesia, Jakarta
- Boediono.1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Case, C. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2012). *Principles of Economics* (10th ed.). United States of America: Prentice Hall.
- Kartasasmita, G. (1994). *Pembangunan Sumber Daya Manusia, IPTEK dan Peranannya Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit ITB. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=Tt64HAAACAAJ>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Siagian, S. P. (1994). *Patologi birokrasi: analisis, identifikasi dan terapinya*. Ghalia Indonesia. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=s4e0QAACAAJ>
- Soedjatmoko, K. C., & Sadoko, I. (1995). *Dinamika ekonomi informal di Jakarta: industri daur ulang, angkutan becak, dan dagang kakilima*. Penerbit Universitas Indonesia. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=vhTtAAAAMAAJ>
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (1976). *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=7y1Hhqaacaaj>
- Susanti, H. (1995). *Indikator-indikator Makroekonomi* (2nd ed.). Jakarta: LP FE UI.
- Tambunan, T. T. . (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris* (Cetakan Ke). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Ekonomi Pembangunan* (9th ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yadiansyah. (2007). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5 (1), 59–78.